

Nomor : B/3520/SM.01.00/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : **Undangan Sosialisasi Pengadaan PPPK
Paruh Waktu**

28 Juli 2025

Yth.

**1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah**

di

Tempat

Dalam rangka tindak lanjut kebijakan penataan pegawai non-ASN yang telah dilaksanakan melalui Pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024, bersama ini dengan hormat kami mengundang Saudara menghadiri rapat virtual melalui zoom meeting yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 29 Juli 2025
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Zoom Meeting : (link akan diinformasikan menyusul)

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, mohon Saudara hadir dalam kegiatan dimaksud tepat pada waktunya. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ABA SUBAGJA

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia

Aparatur

NIP. 197009301996031001

Tembusan

1. Menteri PANRB;
2. Wakil Menteri PANRB.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250725UAWF



Lampiran I
Daftar Undangan

A. Instansi Pusat

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan
8. Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
9. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
10. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
12. Kementerian Pemuda dan Olahraga
13. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
14. Kementerian Dalam Negeri
15. Kementerian Luar Negeri
16. Kementerian Pertahanan
17. Kementerian Keuangan
18. Kementerian Pertanian
19. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
20. Kementerian Perhubungan
21. Kementerian Kesehatan
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Ketenagakerjaan
24. Kementerian Sosial
25. Kementerian Kelautan dan Perikanan
26. Kementerian Komunikasi dan Digital
27. Kementerian Perdagangan
28. Kementerian Perindustrian
29. Kementerian Hak Asasi Manusia
30. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
31. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
32. Kementerian Kebudayaan
33. Kementerian Transmigrasi
34. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
35. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
36. Kementerian Koperasi
37. Kementerian Pariwisata
38. Kementerian Kehutanan
39. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
40. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
41. Kementerian Pekerjaan Umum
42. Kementerian Hukum

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250725UAWF



43. Kementerian Sekretariat Negara
44. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
45. Badan Intelijen Negara
46. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
47. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
48. Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia
49. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
50. Badan Siber dan Sandi Negara
51. Badan Kepegawaian Negara
52. Lembaga Administrasi Negara
53. Badan Pusat Statistik
54. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
55. Arsip Nasional Republik Indonesia
56. Badan Informasi Geospasial
57. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
58. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
59. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
60. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
61. Perpustakaan Nasional
62. Badan Standardisasi Nasional
63. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
64. Badan Pengawas Obat dan Makanan
65. Lembaga Ketahanan Nasional
66. Kepolisian Negara Republik Indonesia
67. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
68. Badan Narkotika Nasional
69. Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
70. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71. Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
72. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
73. Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
74. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
75. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
76. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
77. Badan Keamanan Laut
78. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
79. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
80. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
81. Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
82. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
83. Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
84. Badan Pengawas Pemilihan Umum
85. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
86. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
87. Badan Riset dan Inovasi Nasional

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250725UAWF



88. Badan Pangan Nasional
89. Otorita Ibu Kota Nusantara
90. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
91. Badan Karantina Indonesia
92. Badan Penyelenggara Haji
93. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
94. Badan Gizi Nasional

B. Instansi Daerah

1. Pemerintah Aceh
2. Pemerintah Kab. Aceh Besar
3. Pemerintah Kab. Pidie
4. Pemerintah Kab. Aceh Utara
5. Pemerintah Kab. Aceh Timur
6. Pemerintah Kab. Aceh Selatan
7. Pemerintah Kab. Aceh Barat
8. Pemerintah Kab. Aceh Tengah
9. Pemerintah Kab. Aceh Tenggara
10. Pemerintah Kab. Simeulue
11. Pemerintah Kab. Bireuen
12. Pemerintah Kab. Aceh Singkil
13. Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya
14. Pemerintah Kab. Gayo Lues
15. Pemerintah Kab. Aceh Tamiang
16. Pemerintah Kab. Nagan Raya
17. Pemerintah Kab. Aceh Jaya
18. Pemerintah Kab. Bener Meriah
19. Pemerintah Kab. Pidie Jaya
20. Pemerintah Kota Sabang
21. Pemerintah Kota Banda Aceh
22. Pemerintah Kota Langsa
23. Pemerintah Kota Lhokseumawe
24. Pemerintah Kota Subulussalam
25. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
26. Pemerintah Kab. Deli Serdang
27. Pemerintah Kab. Karo
28. Pemerintah Kab. Langkat
29. Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah
30. Pemerintah Kab. Simalungun
31. Pemerintah Kab. Labuhanbatu
32. Pemerintah Kab. Dairi
33. Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
34. Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan
35. Pemerintah Kab. Asahan
36. Pemerintah Kab. Nias
37. Pemerintah Kab. Toba
38. Pemerintah Kab. Mandailing Natal
39. Pemerintah Kab. Nias Selatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250725UAWF



40. Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
41. Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
42. Pemerintah Kab. Samosir
43. Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
44. Pemerintah Kab. Padang Lawas
45. Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
46. Pemerintah Kab. Batubara
47. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
48. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
49. Pemerintah Kab. Nias Barat
50. Pemerintah Kab. Nias Utara
51. Pemerintah Kota Medan
52. Pemerintah Kota Tebing Tinggi
53. Pemerintah Kota Binjai
54. Pemerintah Kota Pematang Siantar
55. Pemerintah Kota Tanjung Balai
56. Pemerintah Kota Sibolga
57. Pemerintah Kota Padangsidimpuan
58. Pemerintah Kota Gunungsitoli
59. Pemerintah Provinsi Riau
60. Pemerintah Kab. Kampar
61. Pemerintah Kab. Bengkalis
62. Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
63. Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
64. Pemerintah Kab. Pelalawan
65. Pemerintah Kab. Rokan Hulu
66. Pemerintah Kab. Rokan Hilir
67. Pemerintah Kab. Siak
68. Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
69. Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
70. Pemerintah Kota Pekanbaru
71. Pemerintah Kota Dumai
72. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
73. Pemerintah Kab. Agam
74. Pemerintah Kab. Pasaman
75. Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
76. Pemerintah Kab. Solok
77. Pemerintah Kab. Padang Pariaman
78. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
79. Pemerintah Kab. Tanah Datar
80. Pemerintah Kab. Sijunjung
81. Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
82. Pemerintah Kab. Solok Selatan
83. Pemerintah Kab. Dharmasraya
84. Pemerintah Kab. Pasaman Barat
85. Pemerintah Kota Bukittinggi
86. Pemerintah Kota Padang Panjang
87. Pemerintah Kota Sawahlunto

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250725UAWF



88. Pemerintah Kota Solok
89. Pemerintah Kota Padang
90. Pemerintah Kota Payakumbuh
91. Pemerintah Kota Pariaman
92. Pemerintah Provinsi Jambi
93. Pemerintah Kab. Batang Hari
94. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
95. Pemerintah Kab. Bungo
96. Pemerintah Kab. Merangin
97. Pemerintah Kab. Kerinci
98. Pemerintah Kab. Sarolangun
99. Pemerintah Kab. Tebo
100. Pemerintah Kab. Muaro Jambi
101. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur
102. Pemerintah Kota Jambi
103. Pemerintah Kota Sungai Penuh
104. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
105. Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
106. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
107. Pemerintah Kab. Muara Enim
108. Pemerintah Kab. Lahat
109. Pemerintah Kab. Musi Rawas
110. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
111. Pemerintah Kab. Banyuasin
112. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
113. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.
114. Pemerintah Kab. Ogan Ilir
115. Pemerintah Kab. Empat Lawang
116. Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
117. Pemerintah Kota Palembang
118. Pemerintah Kota Pagar Alam
119. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
120. Pemerintah Kota Prabumulih
121. Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
122. Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
123. Pemerintah Kab. Bangka
124. Pemerintah Kab. Belitung
125. Pemerintah Kab. Bangka Barat
126. Pemerintah Kab. Bangka Tengah
127. Pemerintah Kab. Bangka Selatan
128. Pemerintah Kab. Belitung Timur
129. Pemerintah Kota Pangkal Pinang
130. Pemerintah Provinsi Bengkulu
131. Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
132. Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
133. Pemerintah Kab. Rejang Lebong
134. Pemerintah Kab. Kaur
135. Pemerintah Kab. Seluma

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250725UAWF



136. Pemerintah Kab. Mukomuko
137. Pemerintah Kab. Kepahiang
138. Pemerintah Kab. Lebong
139. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
140. Pemerintah Kota Bengkulu
141. Pemerintah Provinsi Lampung
142. Pemerintah Kab. Lampung Selatan
143. Pemerintah Kab. Lampung Tengah
144. Pemerintah Kab. Lampung Utara
145. Pemerintah Kab. Lampung Barat
146. Pemerintah Kab. Tulang Bawang
147. Pemerintah Kab. Tanggamus
148. Pemerintah Kab. Way Kanan
149. Pemerintah Kab. Lampung Timur
150. Pemerintah Kab. Pesawaran
151. Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
152. Pemerintah Kab. Pringsewu
153. Pemerintah Kab. Mesuji
154. Pemerintah Kab. Pesisir Barat
155. Pemerintah Kota Metro
156. Pemerintah Kota Bandar Lampung
157. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
158. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
159. Pemerintah Kab. Bogor
160. Pemerintah Kab. Sukabumi
161. Pemerintah Kab. Cianjur
162. Pemerintah Kab. Bekasi
163. Pemerintah Kab. Karawang
164. Pemerintah Kab. Purwakarta
165. Pemerintah Kab. Subang
166. Pemerintah Kab. Bandung
167. Pemerintah Kab. Sumedang
168. Pemerintah Kab. Garut
169. Pemerintah Kab. Tasikmalaya
170. Pemerintah Kab. Ciamis
171. Pemerintah Kab. Cirebon
172. Pemerintah Kab. Kuningan
173. Pemerintah Kab. Indramayu
174. Pemerintah Kab. Majalengka
175. Pemerintah Kab. Bandung Barat
176. Pemerintah Kab. Pangandaran
177. Pemerintah Kota Bandung
178. Pemerintah Kota Bogor
179. Pemerintah Kota Sukabumi
180. Pemerintah Kota Cirebon
181. Pemerintah Kota Bekasi
182. Pemerintah Kota Depok
183. Pemerintah Kota Cimahi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250725UAWF



184. Pemerintah Kota Tasikmalaya
185. Pemerintah Kota Banjar
186. Pemerintah Provinsi Banten
187. Pemerintah Kab. Serang
188. Pemerintah Kab. Pandeglang
189. Pemerintah Kab. Lebak
190. Pemerintah Kab. Tangerang
191. Pemerintah Kota Tangerang
192. Pemerintah Kota Cilegon
193. Pemerintah Kota Serang
194. Pemerintah Kota Tangerang Selatan
195. Pemerintah Daerah D I Yogyakarta
196. Pemerintah Kab. Bantul
197. Pemerintah Kab. Sleman
198. Pemerintah Kab. Gunungkidul
199. Pemerintah Kab. Kulon Progo
200. Pemerintah Kota Yogyakarta
201. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
202. Pemerintah Kab. Semarang
203. Pemerintah Kab. Kendal
204. Pemerintah Kab. Demak
205. Pemerintah Kab. Grobogan
206. Pemerintah Kab. Pekalongan
207. Pemerintah Kab. Batang
208. Pemerintah Kab. Tegal
209. Pemerintah Kab. Brebes
210. Pemerintah Kab. Pati
211. Pemerintah Kab. Kudus
212. Pemerintah Kab. Pemalang
213. Pemerintah Kab. Jepara
214. Pemerintah Kab. Rembang
215. Pemerintah Kab. Blora
216. Pemerintah Kab. Banyumas
217. Pemerintah Kab. Cilacap
218. Pemerintah Kab. Purbalingga
219. Pemerintah Kab. Banjarnegara
220. Pemerintah Kab. Magelang
221. Pemerintah Kab. Temanggung
222. Pemerintah Kab. Wonosobo
223. Pemerintah Kab. Purworejo
224. Pemerintah Kab. Kebumen
225. Pemerintah Kab. Klaten
226. Pemerintah Kab. Boyolali
227. Pemerintah Kab. Sragen
228. Pemerintah Kab. Sukoharjo
229. Pemerintah Kab. Karanganyar
230. Pemerintah Kab. Wonogiri
231. Pemerintah Kota Semarang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250725UAWF



232. Pemerintah Kota Salatiga
233. Pemerintah Kota Pekalongan
234. Pemerintah Kota Tegal
235. Pemerintah Kota Magelang
236. Pemerintah Kota Surakarta
237. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
238. Pemerintah Kab. Gresik
239. Pemerintah Kab. Mojokerto
240. Pemerintah Kab. Sidoarjo
241. Pemerintah Kab. Jombang
242. Pemerintah Kab. Sampang
243. Pemerintah Kab. Pamekasan
244. Pemerintah Kab. Sumenep
245. Pemerintah Kab. Bangkalan
246. Pemerintah Kab. Bondowoso
247. Pemerintah Kab. Situbondo
248. Pemerintah Kab. Banyuwangi
249. Pemerintah Kab. Jember
250. Pemerintah Kab. Malang
251. Pemerintah Kab. Pasuruan
252. Pemerintah Kab. Probolinggo
253. Pemerintah Kab. Lumajang
254. Pemerintah Kab. Kediri
255. Pemerintah Kab. Tulungagung
256. Pemerintah Kab. Nganjuk
257. Pemerintah Kab. Trenggalek
258. Pemerintah Kab. Blitar
259. Pemerintah Kab. Madiun
260. Pemerintah Kab. Ngawi
261. Pemerintah Kab. Magetan
262. Pemerintah Kab. Ponorogo
263. Pemerintah Kab. Pacitan
264. Pemerintah Kab. Bojonegoro
265. Pemerintah Kab. Tuban
266. Pemerintah Kab. Lamongan
267. Pemerintah Kota Surabaya
268. Pemerintah Kota Mojokerto
269. Pemerintah Kota Malang
270. Pemerintah Kota Pasuruan
271. Pemerintah Kota Probolinggo
272. Pemerintah Kota Blitar
273. Pemerintah Kota Kediri
274. Pemerintah Kota Madiun
275. Pemerintah Kota Batu
276. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
277. Pemerintah Kab. Sambas
278. Pemerintah Kab. Sanggau
279. Pemerintah Kab. Sintang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250725UAWF



280. Pemerintah Kab. Mempawah
281. Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
282. Pemerintah Kab. Ketapang
283. Pemerintah Kab. Bengkayang
284. Pemerintah Kab. Landak
285. Pemerintah Kab. Melawi
286. Pemerintah Kab. Sekadau
287. Pemerintah Kab. Kubu Raya
288. Pemerintah Kab. Kayong Utara
289. Pemerintah Kota Pontianak
290. Pemerintah Kota Singkawang
291. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
292. Pemerintah Kab. Kapuas
293. Pemerintah Kab. Barito Utara
294. Pemerintah Kab. Barito Selatan
295. Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
296. Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
297. Pemerintah Kab. Pulang Pisau
298. Pemerintah Kab. Gunung Mas
299. Pemerintah Kab. Lamandau
300. Pemerintah Kab. Sukamara
301. Pemerintah Kab. Murung Raya
302. Pemerintah Kab. Katingan
303. Pemerintah Kab. Seruyan
304. Pemerintah Kab. Barito Timur
305. Pemerintah Kota Palangka Raya
306. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
307. Pemerintah Kab. Banjar
308. Pemerintah Kab. Tanah Laut
309. Pemerintah Kab. Tapin
310. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
311. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
312. Pemerintah Kab. Barito Kuala
313. Pemerintah Kab. Tabalong
314. Pemerintah Kab. Kotabaru
315. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
316. Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
317. Pemerintah Kab. Balangan
318. Pemerintah Kota Banjarmasin
319. Pemerintah Kota Banjarbaru
320. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
321. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
322. Pemerintah Kab. Paser
323. Pemerintah Kab. Berau
324. Pemerintah Kab. Kutai Barat
325. Pemerintah Kab. Kutai Timur
326. Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
327. Pemerintah Kab. Mahakam Ulu

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250725UAWF



328. Pemerintah Kota Samarinda
329. Pemerintah Kota Balikpapan
330. Pemerintah Kota Bontang
331. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
332. Pemerintah Kab. Minahasa
333. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
334. Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
335. Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
336. Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
337. Pemerintah Kab. Minahasa Utara
338. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
339. Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro
340. Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
341. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
342. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
343. Pemerintah Kota Manado
344. Pemerintah Kota Bitung
345. Pemerintah Kota Tomohon
346. Pemerintah Kota Kota Mobagu
347. Pemerintah Provinsi Gorontalo
348. Pemerintah Kab. Gorontalo
349. Pemerintah Kab. Boalemo
350. Pemerintah Kab. Pohuwato
351. Pemerintah Kab. Bone Bolango
352. Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
353. Pemerintah Kota Gorontalo
354. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
355. Pemerintah Kab. Poso
356. Pemerintah Kab. Donggala
357. Pemerintah Kab. Tolitoli
358. Pemerintah Kab. Banggai
359. Pemerintah Kab. Buol
360. Pemerintah Kab. Morowali
361. Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
362. Pemerintah Kab. Parigi Moutong
363. Pemerintah Kab. Tojo Una Una
364. Pemerintah Kab. Sigi
365. Pemerintah Kab. Banggai Laut
366. Pemerintah Kab. Morowali Utara
367. Pemerintah Kota Palu
368. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
369. Pemerintah Kab. Pinrang
370. Pemerintah Kab. Gowa
371. Pemerintah Kab. Wajo
372. Pemerintah Kab. Bone
373. Pemerintah Kab. Tana Toraja
374. Pemerintah Kab. Maros
375. Pemerintah Kab. Luwu

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250725UAWF



376. Pemerintah Kab. Sinjai
377. Pemerintah Kab. Bulukumba
378. Pemerintah Kab. Bantaeng
379. Pemerintah Kab. Jeneponto
380. Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
381. Pemerintah Kab. Takalar
382. Pemerintah Kab. Barru
383. Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang
384. Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
385. Pemerintah Kab. Soppeng
386. Pemerintah Kab. Enrekang
387. Pemerintah Kab. Luwu Utara
388. Pemerintah Kab. Luwu Timur
389. Pemerintah Kab. Toraja Utara
390. Pemerintah Kota Makassar
391. Pemerintah Kota Parepare
392. Pemerintah Kota Palopo
393. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
394. Pemerintah Kab. Konawe
395. Pemerintah Kab. Buton
396. Pemerintah Kab. Muna
397. Pemerintah Kab. Kolaka
398. Pemerintah Kab. Konawe Selatan
399. Pemerintah Kab. Kolaka Utara
400. Pemerintah Kab. Bombana
401. Pemerintah Kab. Wakatobi
402. Pemerintah Kab. Buton Utara
403. Pemerintah Kab. Konawe Utara
404. Pemerintah Kab. Kolaka Timur
405. Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
406. Pemerintah Kab. Buton Selatan
407. Pemerintah Kab. Buton Tengah
408. Pemerintah Kab. Muna Barat
409. Pemerintah Kota Kendari
410. Pemerintah Kota Baubau
411. Pemerintah Provinsi Bali
412. Pemerintah Kab. Buleleng
413. Pemerintah Kab. Jembrana
414. Pemerintah Kab. Klungkung
415. Pemerintah Kab. Gianyar
416. Pemerintah Kab. Karangasem
417. Pemerintah Kab. Bangli
418. Pemerintah Kab. Badung
419. Pemerintah Kab. Tabanan
420. Pemerintah Kota Denpasar
421. Pemerintah Provinsi NTB
422. Pemerintah Kab. Lombok Barat
423. Pemerintah Kab. Lombok Tengah

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250725UAWF



424. Pemerintah Kab. Lombok Timur
425. Pemerintah Kab. Bima
426. Pemerintah Kab. Sumbawa
427. Pemerintah Kab. Dompu
428. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
429. Pemerintah Kab. Lombok Utara
430. Pemerintah Kota Mataram
431. Pemerintah Kota Bima
432. Pemerintah Provinsi NTT
433. Pemerintah Kab. Kupang
434. Pemerintah Kab. Belu
435. Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
436. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
437. Pemerintah Kab. Alor
438. Pemerintah Kab. Sikka
439. Pemerintah Kab. Flores Timur
440. Pemerintah Kab. Ende
441. Pemerintah Kab. Ngada
442. Pemerintah Kab. Manggarai
443. Pemerintah Kab. Sumba Timur
444. Pemerintah Kab. Sumba Barat
445. Pemerintah Kab. Lembata
446. Pemerintah Kab. Rote Ndao
447. Pemerintah Kab. Manggarai Barat
448. Pemerintah Kab. Manggarai Timur
449. Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
450. Pemerintah Kab. Nagekeo
451. Pemerintah Kab. Sumba Tengah
452. Pemerintah Kab. Sabu Raijua
453. Pemerintah Kab. Malaka
454. Pemerintah Kota Kupang
455. Pemerintah Provinsi Maluku
456. Pemerintah Kab. Maluku Tengah
457. Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
458. Pemerintah Kab. Buru
459. Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar
460. Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
461. Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
462. Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
463. Pemerintah Kab. Buru Selatan
464. Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
465. Pemerintah Kota Ambon
466. Pemerintah Kota Tual
467. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
468. Pemerintah Kab. Halmahera Barat
469. Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
470. Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
471. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250725UAWF



472. Pemerintah Kab. Halmahera Utara
473. Pemerintah Kab. Halmahera Timur
474. Pemerintah Kab. Pulau Morotai
475. Pemerintah Kab. Pulau Taliabu
476. Pemerintah Kota Ternate
477. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
478. Pemerintah Provinsi Papua
479. Pemerintah Kab. Jayapura
480. Pemerintah Kab. Biak Numfor
481. Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen
482. Pemerintah Kab. Sarmi
483. Pemerintah Kab. Keerom
484. Pemerintah Kab. Waropen
485. Pemerintah Kab. Supiori
486. Pemerintah Kab. Mamberamo Raya
487. Pemerintah Kota Jayapura
488. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
489. Pemerintah Kab. Bintan
490. Pemerintah Kab. Karimun
491. Pemerintah Kab. Natuna
492. Pemerintah Kab. Lingga
493. Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
494. Pemerintah Kota Batam
495. Pemerintah Kota Tanjungpinang
496. Pemerintah Provinsi Papua Barat
497. Pemerintah Kab. Manokwari
498. Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
499. Pemerintah Kab. Teluk Wondama
500. Pemerintah Kab. Fak-Fak
501. Pemerintah Kab. Kaimana
502. Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
503. Pemerintah Kab. Manokwari Selatan
504. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
505. Pemerintah Kab. Pasangkayu
506. Pemerintah Kab. Mamuju
507. Pemerintah Kab. Mamasa
508. Pemerintah Kab. Polewali Mandar
509. Pemerintah Kab. Majene
510. Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
511. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
512. Pemerintah Kab. Bulungan
513. Pemerintah Kab. Malinau
514. Pemerintah Kab. Nunukan
515. Pemerintah Kab. Tana Tidung
516. Pemerintah Kota Tarakan
517. Pemerintah Provinsi Papua Selatan
518. Pemerintah Kab. Merauke
519. Pemerintah Kab. Boven Digoel

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250725UAWF



520. Pemerintah Kab. Mappi
521. Pemerintah Kab. Asmat
522. Pemerintah Provinsi Papua Tengah
523. Pemerintah Kab. Nabire
524. Pemerintah Kab. Paniai
525. Pemerintah Kab. Puncak Jaya
526. Pemerintah Kab. Mimika
527. Pemerintah Kab. Intan Jaya
528. Pemerintah Kab. Deiyai
529. Pemerintah Kab. Dogiyai
530. Pemerintah Kab. Puncak
531. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
532. Pemerintah Kab. Jayawijaya
533. Pemerintah Kab. Yahukimo
534. Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
535. Pemerintah Kab. Tolikara
536. Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
537. Pemerintah Kab. Nduga
538. Pemerintah Kab. Lanny Jaya
539. Pemerintah Kab. Yalimo
540. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya
541. Pemerintah Kab. Sorong
542. Pemerintah Kab. Sorong Selatan
543. Pemerintah Kab. Raja Ampat
544. Pemerintah Kab. Maybrat
545. Pemerintah Kab. Tambrauw
546. Pemerintah Kota Sorong

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250725UAWF



Lampiran II Susunan Acara

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	10.00 – 10.05	Pembukaan	-
2	10.05 – 10.20	Arahan Menteri PANRB	-
3	10.20 – 11.00	Penyampaian Kebijakan PPPK Paruh Waktu	Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB
4	11.00 – 11.40	Mekanisme Pengusulan PPPK Paruh Waktu	Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, BKN
5	11.40 – 12.00	Tanya Jawab	-
6	12.00	Penutup	-

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250725UAWF

